



## IKHTISAR EKSEKUTIVE

Salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel selama Tahun Anggaran 2018 disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama tahun 2018 sebagai implementasi tugas yang diemban oleh organisasi. Laporan ini selain merupakan suatu kewajiban sebagaimana Inpres No 7 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja pemerintah, juga merupakan salah satu kebutuhan bagi Dinas dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP ini menyajikan berbagai kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2018 yang meliputi kegiatan ke sekretariat dan kegiatan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

### A. Maksud dan Tujuan

#### ➤ Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya administrasi hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

#### ➤ Tujuan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/ arus pelayanan perizinan serta tersedianya Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Boven Digoel.
4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat

### B. Sasaran Pokok

- Eksistensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang menangani Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- Terwujudnya aparatur yang kredibel dan berkualitas;
- Peningkatan sarana dan prasarana baik penunjang kantor maupun sarana masyarakat Untuk Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;



### C. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a) Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan yang masih terbatas;
- b) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi sehingga dapat mempengaruhi citra aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti;
- d) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan.

### D. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut, adalah:

- a) Menganggarkan secara periodik untuk kegiatan pelatihan formal dan bimbingan teknis kepada aparaturnya sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menunjang kinerja;
- b) Menerapkan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c) Menetapkan Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi.